

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas beberapa wilayah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah dalam negara Indonesia merupakan penyelenggara sistem pemerintahan pada otoritas administratif daerah yang lebih kecil dan diatur berdasarkan undang-undang. Saat ini transparansi di lingkungan pemerintah daerah semakin dituntut sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik untuk menjamin kesejahteraan nasional. Transparansi merupakan informasi yang terbuka dan jujur yang disampaikan kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dengan tujuan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh (Nenabu, 2019). Transparansi menggambarkan tantangan bagi reformasi di bidang publik masa kini dan masa depan menuju pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan modern. Transparansi merupakan nilai demokrasi yang penting, pemerintahan yang kredibel, efisien, dan akuntabel. Apalagi dibawah bentuk pemerintahan di Indonesia yaitu demokrasi, transparansi informasi adalah suatu kewajiban (Ningrum, 2023).

Transparansi juga menjadi hal yang wajib sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang berisi tentang keterbukaan informasi publik dimana pemberian kewajiban yang ditujukan kepada setiap Badan Publik secara terbuka memberikan akses bagi setiap pemohon informasi guna mendapatkan informasi publik (bpk.go.id). Hal tersebut searah dengan tujuan transparansi yang tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, karena keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurut (Firmasyah dan Yuniar, 2022) pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang semakin baik mendorong pemerintah daerah akan lebih transparansi dalam menyajikan informasi keuangan di website resminya.

Salah satu persoalan yang memicu adanya transparansi informasi keuangan oleh pemerintah daerah yaitu permasalahan korupsi yang kian marak dan terjadi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi didapatkan dari tidak transparansinya pelaporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diduga dilakukan oleh tersangka tindak pidana korupsi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat. Kementerian Dalam Negeri diharapkan fokus mengawasi pengelolaan anggaran di pemerintah daerah dengan memperkuat sistem pengawasan berjenjang. Menurut manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), modus pemotongan anggaran merupakan cara korupsi yang paling mudah dan tidak memerlukan teknik yang canggih, yakni pimpinan meminta sejumlah uang dari anggaran yang ada pada satuan kerja, dalam hal ini melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (kompas.com, 2023).

Pada fenomena lainnya provinsi Riau memiliki rentetan panjang praktik korupsi kepala daerah. Berdasarkan catatan ICW, sejak tahun 2007 hingga 2023, setidaknya 10 kepala daerah Riau terjaring KPK karena melakukan praktik korupsi. Adil juga diduga memberikan uang sebesar Rp 1,1 miliar kepada Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Pemberian tersebut dilakukan agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti di tahun 2022 mendapatkan predikat baik untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Terkait dengan suap terhadap pemeriksa kasus ini menjadi peringatan bagi BPK setelah sebelumnya auditornya diduga terlibat dalam kasus di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta bekas Bupati Bogor Ade Yasin. Dari beberapa kasus tersebut auditor BPK tidak takut melakukan korupsi (kompas.com, 2023).

Pemerintah yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya di berikan keharusan untuk lebih transparan lagi dalam pelaporan keuangannya. Pemerintah daerah yang besar biasanya pengelolaan keuangannya lebih rumit dan biasanya mendapatkan pengawasan yang lebih besar oleh karena itu pemerintah daerah yang mempunyai ukuran pemerintah yang lebih besar laporan keuangannya harus lebih lengkap dan lebih menjabarkan semua mengenai informasi keuangannya (Yudistira, 2022).

Besarnya ukuran pemerintah daerah khususnya pada pengelolaan aset tetap menimbulkan sikap keingintahuan yang tinggi dari publik. Publik ingin mengawasi dan memastikan pemanfaatan aset tetap daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan aset oleh pengelola daerah. Selain itu, aset pemerintah daerah yang digunakan secara optimal dapat menunjang dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka transparansi informasi publik (Suryaningrum, 2022). Semakin tingginya tingkat transparansi pengelolaan daerah terhadap publik, semakin rendah pula potensi korupsi dalam pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menjadi indikator kemampuan pengelolaan organisasi pemerintah yang lebih baik termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar dianggap memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang lebih kecil (Firmansyah et al., 2022).

Dalam menunjang terjadinya otonomi daerah yang baik diperlukan transparansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan, selain itu transparansi laporan keuangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat. Laporan keuangan yang memiliki kualitas ialah laporan keuangan yang dengan dapat menggambarkan situasi finansial dan kinerja perusahaan, memungkinkan evaluasi masa lalu dan proyeksi masa depan dengan menggunakan informasi yang tersedia. Data finansial yang disajikan akan semakin tajam semakin dekat dengan kebenaran (Nugraeni, 2023) jika penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan tidak

dapat ditelusuri bukti transaksinya dapat berakibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan pimpinan pemerintah daerah memiliki mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022).

Tuntutan penerapan transparansi publik yang semakin meningkat berdampak pada kemampuan manajemen sektor publik dalam menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Mardiasmo (2018). Kualitas laporan keuangan erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan dalam mengungkapkan informasi kepada publik erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah berusaha melegitimasi upayanya untuk menunjukkan kepada publik, termasuk prestasi atas kualitas laporannya (Firmansyah dan Yuniar, 2022). Setelah laporan keuangan pemerintah daerah disiapkan dan siap untuk dipublikasikan kepada publik, perlu untuk melakukan proses audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga audit keuangan (Hasibuan dan Muid, 2021).

Rasio pembiayaan utang menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang, informasi terkait rasio pembiayaan utang harus tersedia dan dapat diakses apabila rasio pembiayaan utang tersedia dan dapat diakses maka pemerintahan tersebut transparan (Intan & Fefri, 2020). Rasio pembiayaan utang merupakan alasan dapat berpengaruhnya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang mulai meminjam beberapa dana dari pihak eksternal, mewajibkan pemerintah tersebut mempublikasikan keuangan daerahnya selaku wujud pertanggungjawaban terhadap kreditur serta membagikan data kepada kreditur menimpa sejauh mana tingkatan kesanggupan dalam pengembaliannya (Nigrum, 2023). Penghargaan dari organisasi eksternal yaitu pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan teori legitimasi yang mana pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini WTP biasanya akan lebih

cenderung melaporkan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja baik yang dilakukan oleh pemda tersebut (Prasawati dan Kiswanto, 2020).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. PAD tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal yang baik dari manajemen publik. Pemerintah daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula (Ningsih, 2018).

Didalam laporan keuangan terdapat informasi keuangan yang penting salah satunya yakni informasi mengenai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan programnya dalam periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu informasi yang dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah (Dezalinda, 2023).

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah Pusat Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dalam aksi pencegahan, pemberantasan korupsi. Publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi (bpk.go.id). Salah satu prinsip anti korupsi adalah transparansi. Transparansi identik dengan

keterbukaan dan kejujuran. Kejujuran dan keterbukaan menciptakan pribadi yang berintegritas, yang dapat dipercaya. Transparansi diperlukan bahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat (kemenkeu.go.id, 2020).

Penelitian ini mereplika penelitian Ningrum, 2023 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020. Pada penelitian ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang membedakan penelitian ini adalah periode penelitian dan adanya penambahan variabel pendapatan asli daerah (PAD) yang mereplika penelitian dari Dezalinda, 2023 dikarenakan pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan programnya dalam periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu informasi yang dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan daerah, baik dari segi ketersediaan maupun aksesibilitasnya dan tahun penelitian, berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2022”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, ruang lingkup penelitian untuk melihat apakah ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penyajian rasio pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintahan daerah dalam rangka memberikan kebijakan yang dilakukan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, rasio pembiayaan utang dan pendapatan asli daerah. Selain itu, manfaat bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

c. Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan keputusan dan literatur mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika penulisan

BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*, penelitian terdahulu, kerangka fikir, serta bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan

metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN